

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Agus Dwiyanto, dkk, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012
- Bambang Istianto, *Demokratisasi Birokrasi*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2008
- Budi Setiyono, *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Nuansa Cendekia, Bandung, 2016
- Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009
- Falih Suaedi & Bintoro Wardiyanto, *Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan E-Governance*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2018
- Hamry Gusman Zakaria, *5 Pilar Revolusi Mental*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2017, Cet. Ke-1
- Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Kementerian Hukum dan HAM RI, *Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani* Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2018
- Kimberly Ann Elliot, *Korupsi dan Ekonomi Dunia*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007,
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Keras Putih*, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Graha Indonesia, Jakarta, 2007,
- Muhammad Ryaas. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, PT Mutira Sumber Widya, Jakarta
- Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2012
- Kimberly Ann Elliot, *Korupsi dan Ekonomi Dunia*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 182.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005,

- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2003
- Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Siswanto sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, sinar garfika, Jakarta, 2012
- Suripto dan Antonius Galih Prasetyo, “Memahami Inovasi Administrasi Negara”, dalam Septiana Dwiputrianti dkk (ed), 2014, *Handbook Inovasi Administrasi Negara*, Pusat Inovasi Tata Pemerintahan LAN, Jakarta
- Poltak Sinambela, Lijan, Dkk, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Pt Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model- model Implementasi Kebijakan Publik* (cetakan keempat), PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016
- Yudi Rusfiana, et.al., *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan*, Alfabeta, Bandung, 2021
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya Laksana, *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016

## B. JURNAL

- Ahmad, M., Budinningsihh, I., Sukamto, H., & Suyanto, B. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Reformasi Birokrasi Di Lembaga Pemerintah”. *International Journal of Economic Research (IJER)*, (2017).
- Antonius Galih Prasetyo “Mengintegrasikan Reformasi Birokrasi dengan Inovasi Sektor Publik” *Jurnal Analis Kebijakan*, Vol. 1 No. 1 (2017)
- Arimuladi, Setia Untung, *Zona Integritas. Konsep Penegakan dan Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance and Clean Government*, Setara Press, Malang, 2022
- Cintya Diva, Rahayu, Siti Tiara Maulia, “Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien” *Jurnal Hukum Kewarganegaraan*, Vol. 3 No. 6 Tahun 2024, hlm. 3, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/3220/3029>
- Deva Sasti Wilujeng, O. L. “Evaluasi Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Studi Pembangunan Zona Integritas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang)”

- Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, Vol 3 No. 2, Agustus 2020, hlm. 127, <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1286>
- Fasa, A. W. H., & Sani, S. Y. "Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001: 2016 dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik" *Integritas: Jurnal Antikorupsi*. doi: 10.32697/integritas.v6i2.684
- Hulman Siregar dan Rahmat Bowo Suharto, "Analysis and Review of The Implementation of Law Enforcement Operations Juridicial Capture Corruption in The Criminal Justice System" *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2 No. 4, Desember 2009
- Hapsari, J., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P, "Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di BBWS Pemali Juana Semarang" *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Nomor 1
- Kristian, "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut". *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9 (2022)
- Kusumastuti, "Reformasi Birokrasi dengan Implementasi Manajemen SUMBERDAYA Manusia Berbasis Kompetensi" *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 9 (2019)
- Lilis Sholihah dan Mulianingsih, "Reformasi Birokrasi (Reposisi dan Penerapan E-Government), *Jurnal Media Birokrasi*, Volume 5 Nomor 1, April (2023)
- Lalu Wahyu Sagita dan Budi Suryadi, "Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan" *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 10 No. 2, 2024
- Mohammad Thahir. "Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik." *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik* 4 (2018). [journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp](http://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp)
- Rivi Rivani Radiansyah, "Reformasi Birokrasi Sebagai Upaya Mewujudkan *Good Governance* Melalui Kerangka Otonomi Daerah" *Jurnal Inovasi Sosial dan Politik*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020, hlm 81, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/6387>
- Sholihah, L., & Mulianingsih. "Reformasi Birokrasi (Reposisi dan Penerapan E-Government)." *Jurnal Media Birokrasi*, 5 (1), 2023, hlm. 49 <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jmb.v5i1.3189>
- Suhendar, "Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008)", *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik* 13 (2020)
- Thirarisani, Arifin, Z., & Rizaldy, M. (2023). Efektivitas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di

Kantor Pertanahan Kota Langsa. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(1), 168–184. Hlm. 171 <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i3.5187>

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar nEgara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan terhadap Korupsi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah